PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/7/2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA MADIUN TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dengan memperhatikan Capaian Kinerja program dan kegiatan serta pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Madiun Tahun 2024 perlu membentuk Panitia Khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Madiun Tahun 2024 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 28 Februari 2025 Nomor 170/262/401.040/2025 Perihal Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
2. Surat Wali Kota Madiun tanggal 23 Maret 2025 Nomor 130/119/401.011/2025 perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Madiun Tahun 2024;
3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 24 Maret 2025 Nomor 170/620/401.040/2025 Perihal Permintaan Anggota Pansus DPRD Kota Madiun Pembahasan LKPJ Tahun 2024;
4. Surat Ketua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 24 Maret 2025 Nomor 00030/F.Demokrat/III/2025 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Wali Kota Madiun Tahun 2024;
5. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 24 Maret 2025 Nomor 006/F.PKB/III/2025 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Tahun 2024;

6. Surat Ketua Fraksi PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 24 Maret 2025 Nomor 005/F.PSI/III/2025 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Tahun 2024;
7. Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 24 Maret 2025 Nomor 006/F.PDIP/III/2025 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Tahun 2024;
8. Surat Ketua Fraksi Perindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 24 Maret 2025 Nomor 006/F.Perindo/III/2025 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Tahun 2024;
9. Surat Ketua Fraksi Gerindra-Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 24 Maret 2025 Nomor 003/F.Gerindra-NasDem/DPRD/III/2025 Perihal Usulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Wali Kota Madiun Tahun 2024;
10. Surat Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 24 Maret 2025 Nomor 007/FPG/III/2025 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Tahun 2024;
11. Surat Ketua Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 24 Maret 2025 Nomor 03.004/F.PKS/III/2025 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Tahun 2024;
12. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 25 Maret 2025 dengan acara Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Madiun atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Madiun Tahun 2024;
13. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 25 Maret 2025 dengan acara Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Madiun Tahun 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Madiun Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana Diktum "KESATU" adalah:

1. melaksanakan Pendampingan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Madiun Tahun 2024 dengan Tim Ahli;
2. melaksanakan Studi Banding terkait Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2024;
3. melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Madiun Tahun 2024 dengan Tim Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Madiun; dan
4. menyusun Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Madiun Tahun 2024.

KETIGA : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan 25 April 2025 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Rapat Paripurna.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN
Ketua,

KETUA DPRD KOTA MADIUN

Drs. H. ARMAYA

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/7/2025
TANGGAL : 25 MARET 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA MADIUN TAHUN 2024

1.	Ketua	:	H. NGEDI TRISNO YHUSIANTO, S.H., M.Hum.
2.	Wakil Ketua	:	DENNY DJOKO PURNOMO
3.	Anggota	:	YULIANA
4.	Anggota	:	ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.
5.	Anggota	:	Drs. SUGENG, S.H., M.H.
6.	Anggota	:	CITRA KRISTIN
7.	Anggota	:	YOS RUDY WISNU WARDHANA, S.S.
8.	Anggota	:	DIMAS ANTA KARANA, S.Or
9.	Anggota	:	SUDARMADJI, S.E.
10.	Anggota	:	ANTON KUSUMO, S.H.
11.	Sekretaris bukan Anggota	:	Sekretaris DPRD Kota Madiun

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN
Ketua,

KETUA DPRD KOTA MADIUN

Drs. H. ARMAYA